



Kebijakan Strategi Investasi Daerah Kabupaten Sorong

Oktavie Fresiliasari ^{1)*}; Yohanes Suhardjo ²⁾
E-mail Korespondensi : octafresilia@gmail.com

Akuntansi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia^{1,2)}

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 17/06/2024

Diterima: 29/07/2024

Dipublikasikan: 31/07/2024

Akreditasi oleh
Kemenristekdikti
No.79/E/KPT/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai masukan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan investasi yang tepat sasaran dan kebijakan pengawasan terhadap perijinan badan usaha yang efektif sehingga mampu meningkatkan investasi daerah di Kabupaten Sorong dan Para peneliti sebagai referensi tambahan mengenai kebijakan strategi investasi di Kabupaten Sorong. Adapun jenis jenis data pada penelitian ini tergolong ke dalam penelitian studi kasus (*case study*) atau jenis data penelitian yaitu data primer dengan data hasil wawancara mendalam dan observasi langsung. Dalam kajian ini instansi sebagai subyek kajian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong dengan populasi dalam kajian ini yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong. Sampel dipilih dari populasi menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria sampel yang dipilih sebagai partisipan dalam kajian ini yaitu anggota populasi yang memahami permasalahan yang dikaji dan memiliki kewenangan atau peran signifikan dalam pembuatan kebijakan investasi daerah. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong sebaiknya menerapkan kebijakan strategi sinkronisasi rencana tata ruang Kabupaten Sorong. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sorong juga sebaiknya menerapkan kebijakan strategi mengurangi biaya transaksi dan praktik biaya tinggi, Selain kebijakan tersebut, ada juga kebijakan mengenai strategi dalam menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, Selanjutnya dalam kebijakan strategi investasi pada Pemerintah Kabupaten Sorong sebaiknya mengembangkan pola kemitraan antara UMKM serta koperasi. Dengan demikian, dilihat dari beberapa kebijakan strategi investasi tersebut, penerapan yang cocok pada Pemerintah Kabupaten Sorong yaitu dengan menerapkan kebijakan strategi pembangunan kawasan investasi prioritas.

Kata Kunci :

Strategi; Investasi; Pembangunan Daerah

Abstract

This research aims to the Sorong Regency Government as input in formulating and implementing investment policies that are right on target and supervision policies for effective licensing of business entities so as to increase regional investment in Sorong Regency and researchers as additional references regarding investment strategy policies in Sorong Regency. The type of data in this research is classified as case study research or the type of research data, namely primary data with data from in-depth interviews and direct observation. In this study, the agency as the subject of study is the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Sorong Regency with the population in this study being the State Civil Apparatus (ASN) of the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Sorong Regency. Samples were selected from the population using purposive sampling techniques. The sample criteria selected as participants in this study are members of the population who understand the problems studied and have significant authority or role in making regional investment policies. Based on the results and discussion, it can be concluded that the Sorong Regency Government should implement a strategic policy of synchronizing the Sorong Regency spatial plan. In this case, the Sorong Regency Government should also implement a strategic policy to reduce transaction costs and high cost practices, In addition to these policies, there are also policies regarding strategies to ensure business certainty and improve law enforcement, Furthermore, in the investment strategy policy, the Sorong Regency Government should develop partnership patterns between MSMEs and cooperatives. Thus, judging from some of these investment strategy policies, a suitable application for the Sorong Regency Government is to implement a strategic policy for developing priority investment areas.

Keywords:

Strategy; Investment; Regional Development



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan potensi kekayaan alam di wilayah tersebut (Vindiana et al. 2022). Salah satu strategi kunci untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menarik investasi dari pihak luar. Penanaman modal eksternal dapat mempercepat pengembangan potensi daerah, seperti melalui Pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan promosi wisata. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekonomi ini sejalan dengan tujuan utama Pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu menurut Maulani et al. (2020) menjelaskan bahwa Pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai jangka Panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memainkan peran penting dalam merumuskan strategi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Strategi ini

diwujudkan program dan kebijakan yang didasarkan pada potensi wilayah, permasalahan yang dihadapi, dan isu-isu strategis yang ada.

Dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa wilayah Kabupaten Sorong harus diberikan prioritas dalam pembangunan ke depan. Pertama, wilayah ini kaya akan sumber daya minyak dan gas alam yang melimpah. Kedua, selain kekayaan sumber daya energi, terdapat juga cadangan mineral yang menjanjikan seperti logam-logam (seperti tembaga, emas, mangan, aluminium, nikel, kobalt, dan besi), mineral industri, dan sumber daya non-logam seperti bahan konstruksi, batu kapur, marmer, asbes, gypsum, dan batu bara. Ketiga, Kabupaten Sorong memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian dan agribisnis.

Investasi dan penanaman modal memegang peran krusial dalam kemajuan suatu negara atau daerah. Investasi dianggap sebagai salah satu sektor strategis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta berperan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi sehari-hari. Pertumbuhan investasi di suatu daerah menjadi indikator utama kemajuan ekonomi local. Dengan melakukan investasi secara efektif, dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Andani, 2022).

Dengan kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah melalui perubahan cara membangunnya. Namun, pengembangan investasi di Kabupaten Sorong tidaklah mudah karena masih banyak hambatan yang harus diatasi. Salah satu hambatan utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sorong lambat hingga tahun 2023 adalah kinerja investasi yang buruk, akibat dari berbagai masalah yang muncul pada setiap tahap investasi. Kondisi ini menyebabkan kurangnya minat investor untuk melakukan investasi di wilayah ini, baik untuk memperluas usaha yang sudah ada maupun untuk memulai investasi baru. Minat investasi yang rendah ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang selama ini lebih banyak didorong oleh konsumsi daripada investasi.

Selain rendahnya investasi daerah di Kabupaten Sorong, persoalan lain yang dihadapi di bidang investasi yaitu rendahnya pengawasan terhadap perijinan badan usaha. Perijinan badan usaha di Kabupaten Sorong dikeluhkan sejumlah pihak dikarenakan prosedurnya yang membutuhkan waktu relatif lama. Hal ini menyebabkan investor kurang tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Sorong.

Masalah dan tantangan dalam pengembangan wilayah dan investasi di Kabupaten Sorong dalam dua dekade mendatang akan mempengaruhi agenda, tujuan, dan strategi pengembangan wilayah. Diperlukan pendekatan lintas sektoral dan koordinasi yang efektif. Meskipun demikian, peningkatan investasi di Kabupaten Sorong menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan belum terselesaikan hingga saat ini. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 2) Potensi komoditi di setiap kawasan pengembangan belum diketahui kelayakan ekonomi maupun finansialnya.
- 3) Rendahnya kepastian hukum.
- 4) Lemahnya insentif investasi..
- 5) Kualitas Investor Skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi..
- 6) Terbatasnya infrastruktur.
- 7) Kesenjangan antar pelaku ekonomi.
- 8) Tingkat kemahalan.
- 9) Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi.

Mencermati sejumlah permasalahan yang menghambat investasi daerah di Kabupaten Sorong sebagaimana diuraikan di muka, maka Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menentukan sasaran yang akan diraih terkait investasi daerah haruslah tepat. Sebab apabila sasaran yang hendak diraih Pemerintah Kabupaten Sorong keliru maka harapan agar investasi di Kabupaten Sorong akan meningkat sulit untuk dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam usaha meningkatkan investasi di Kabupaten Sorong harus ditetapkan dengan cermat, seperti yang berikut ini:

- 1) Meningkatkan investasi untuk mengembangkan dan menghidupkan kembali wilayah pengembangan serta pusat-pusat pertumbuhan yang telah diidentifikasi sesuai dengan komoditas utama, baik yang telah dikembangkan maupun yang masih memiliki potensi, dengan strategi menempatkan investasi berdasarkan lokasi sumber bahan baku.
- 2) Adanya dorongan atau suasana investasi yang mendukung dalam bentuk penyegaran lembaga ekonomi yang dapat mengurangi rintangan bagi investor. Penyegaran ini melibatkan harmonisasi regulasi antar sektor dan antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kemampuan lembaga dalam menyederhanakan prosedur perizinan, perbaikan sistem perpajakan dan pungutan, penegakan hukum untuk mendukung keamanan dan ketertiban berusaha. Insentif tambahan adalah pengembangan sistem infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah pengembangan dan pusat pertumbuhan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan dan distribusi barang di Kabupaten Sorong, untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang aktif dan produktif.
- 3) Adanya kejelasan hukum melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah, sangat penting. Selain itu, sistem dan prosedur investasi yang transparan akan meningkatkan minat para investor.
- 4) Investasi yang meningkat secara bertahap, terutama di kawasan-kawasan yang diutamakan, berperan penting dalam peningkatan kontribusinya terhadap PDRB dengan distribusi yang lebih merata; dan
- 5) Surplus perdagangan Kabupaten Sorong mengalami peningkatan, baik dalam perdagangan antar wilayah maupun ekspor.

Berdasarkan uraian mengenai persoalan investasi daerah di Kabupaten Sorong dan sasaran yang sebaiknya diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sorong terkait bidang investasi daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini berusaha untuk menguraikan secara naratif mengenai kebijakan investasi daerah yang sebaiknya diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dalam rangka meningkatkan investasi daerah di Kabupaten Sorong. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan mengenai kebijakan investasi daerah yang sebaiknya diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dalam rangka meningkatkan investasi daerah di Kabupaten Sorong.

Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai masukan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan investasi yang tepat sasaran dan kebijakan pengawasan terhadap perijinan badan usaha yang efektif sehingga mampu meningkatkan investasi daerah di Kabupaten Sorong dan Para peneliti sebagai referensi tambahan mengenai kebijakan strategi investasi di Kabupaten Sorong.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Basis Ekonomi

Model ekonomi basis adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Teori ekonomi basis ini hanya mengklarifikasikan seluruh kegiatan ekonomi kedalam duasektor yaitu sektor basis dan sektor non basis (Sihombing dan Pabendon, 2020).

Menurut (Tarigan, 2014) dalam (Saputra, 2023), sektor basis memainkan peran penting dalam mengarahkan pembangunan secara menyeluruh di suatu daerah, sementara sektor nonbasis berfungsi sebagai pendukung bagi pembangunan tersebut. Sektor basis secara khusus merupakan sektor unggulan karena fokus utamanya adalah pada ekspor barang dan jasa yang melampaui batas wilayah lokal (sektor unggulan). Di sisi lain, sektor nonbasis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat dalam batas wilayah ekonomi yang bersangkutan tanpa perlu diekspor ke luar wilayah, dikarenakan keterbatasan kemampuan sektor tersebut untuk memenuhi kebutuhan lokal. Produksi dan pemasaran dalam sektor nonbasis terbatas pada lingkup wilayah lokal.

Strategi Pengembangan *Leading/Key Industry*

Dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang menggunakan pendekatan sektoral, maka harus dilakukan perumusan dan pemilihan strategi yang tepat sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tercapai. Begitu pula dengan strategi pengembangan sektor-sektor unggulan pada suatu daerah, agar dapat berperan secara optimal dalam menstimulasi perkembangan ekonomi daerah, maka harus dilakukan perumusan dan pemilihan strategi yang tepat dan layak (Uar dan Madubun, 2021). Strategi pengembangan industri utama merupakan pilihan strategi pembangunan daerah yang paling diminati untuk dilaksanakan. Industri utama yang dikembangkan biasanya adalah kegiatan atau sektor industri di daerah yang memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan sektor serupa di daerah lain.

Industri utama yang dikembangkan di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan baik dari perusahaan maupun rumah tangga serta pendapatan dari pajak daerah. Salah satu pendekatan untuk memilih industri utama yang memiliki keunggulan kompetitif adalah melalui "revealed comparative advantage (RCA)" dengan indeks RCA di atas 1.

Keunggulan kompetitif dari industri utama dapat dipertahankan dengan memastikan bahwa industri tersebut mampu menghasilkan penghematan eksternal, seperti yang terjadi melalui pengembangan industri hilir dan industri penunjang. Untuk mendukung proses ini, Pemerintah Daerah perlu memberikan berbagai kemudahan dan insentif investasi yang dapat mendorong pertumbuhan industri utama ini. Pemberian insentif ini harus terkait dengan kemampuan industri untuk melakukan penelitian dan pengembangan (R&D) serta inovasi, sehingga multiplier effect terhadap ekonomi daerah dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Industri utama yang telah matang perlu segera dicari penggantinya, mengingat penurunan dalam pertumbuhan penjualannya bisa mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Sebaiknya, suatu daerah tidak hanya bergantung pada satu industri utama, contohnya Sumatera Barat dengan PT Semen Padang dan Papua dengan PT Freeport Indonesia. Namun demikian, pilihan industri utama sebaiknya tidak terlalu banyak, mengingat keterbatasan daya serap ekonomi lokal dalam menyediakan tenaga kerja terampil dan infrastruktur yang dibutuhkan.

Kelemahan utama dari strategi pembangunan industri unggulan ini adalah risiko terjadinya polarisasi pembangunan yang terfokus hanya pada wilayah inti yang terbatas. Contoh yang sudah terlihat adalah keberadaan PT Caltex di Dumai, PT Freeport Indonesia di Papua, serta proyek-proyek mega lainnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Strategi *Growth Center*

Strategi pusat pertumbuhan menjadi terkenal di kalangan arsitek pembangunan kota pada tahun 1960 dan 1970. Strategi ini menitikberatkan pada pentingnya menyediakan fasilitas kota atau infrastruktur di lokasi strategis seperti pelabuhan, tempat transit, dan persimpangan dekat dengan pusat pertumbuhan industri. Menurut (Restiatun, 2013) dalam (Pragmadeanti dan Rahmawati, 2022), adanya penentuan pusat pertumbuhan yang tepat dengan mengetahui potensi wilayah paling kuat akan mendorong perembetan pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan.

Strategi pusat pertumbuhan telah sukses diterapkan di Indonesia, terutama melalui pembangunan kawasan seperti Pulau Batam dan kawasan industri di Pulogadung Jakarta. Keberhasilan Pulau Batam dapat diatributkan pada lokasinya yang strategis dekat dengan pusat perdagangan internasional di Singapura, serta pemanfaatan industri penunjang yang terhubung dengan industri elektronika utama di negara tetangga. Pembangunan obyek wisata baru juga berperan penting dalam mencapai kesuksesan ini, selain upaya keras dari manajemen tingkat atas dalam pengelolaan kawasan Batam. Di sisi lain, kawasan industri Pulogadung saat ini menghadapi tantangan struktural karena meningkatnya "external diseconomies" dan "urbanization diseconomies" yang berasal dari pertumbuhan kota Jakarta, terutama di sekitar lokasi kawasan tersebut.

Saat ini, strategi pengembangan ekonomi daerah melalui pendekatan pusat pertumbuhan telah mengalami kemajuan signifikan dan diterapkan di berbagai lokasi strategis di seluruh dunia. Contoh yang paling terkenal adalah Silicon Valley, yang telah dikembangkan secara intensif dengan memanfaatkan aglomerasi industri terkait seperti komputer, semikonduktor, dan elektronik.

Strategi Pengembangan *Ancillary Industry*

Jika suatu industri yang berorientasi pada ekspor atau merupakan industri utama telah mengembangkan kawasan industri atau fasilitas seperti pelabuhan atau bandara dengan cukup baik, sehingga menciptakan pasar untuk produk-produk lanjutan baik dalam rantai pasokan maupun pemasaran, serta menghasilkan efisiensi lokal yang menguntungkan bagi industri terkait, maka strategi pengembangan industri penunjang sudah dapat diterapkan.

Industri penunjang tertarik untuk berlokasi di suatu daerah karena dapat menghemat biaya transportasi, terutama ketika baik industri utama maupun penunjang menggunakan bahan baku atau produk intermediate yang serupa dalam proses produksi mereka. Contoh kasusnya adalah dalam industri kertas, semen, bahan baku cat, pembuatan karoseri kendaraan, percetakan, dan lain sebagainya. Selain itu, lokasi dekat dengan industri utama juga menarik karena memungkinkan industri penunjang untuk dengan mudah mengakses tenaga kerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, sering kali dengan tingkat upah yang lebih rendah.

Selanjutnya kehadiran industri penunjang ini dapat menghasilkan efisiensi lokal di wilayah tersebut, termasuk perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan pemeliharaan, bisnis, profesi, serta transportasi dan komunikasi. Semua kegiatan ini dapat mendorong pertumbuhan ekspor dan ekonomi di daerah tersebut, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan.

METODE PENELITIAN

Jenis data pada penelitian ini termasuk dalam studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan opini mereka. Dalam penelitian ini, instansi yang menjadi subjek kajian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong. Populasi sampel yang digunakan merupakan total dari semua subjek yang akan diteliti, seperti yang dijelaskan oleh Arikunto (2013) dalam Polii et al. (2021) dalam hal ini yang menjadi populasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong, sedangkan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang dimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019) bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan kriteria-kriteria tertentu.

Adapun para partisipan pada kajian ini adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sorong, Bapak Dr. Salmon Samori, S.Sos., M.Si. (SS). Partisipan tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa partisipan adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Sorong yang memiliki peran signifikan dalam pembuatan kebijakan investasi daerah Kabupaten Sorong yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai mengenai kebijakan investasi daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merujuk kepada sumber data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019). Dalam penelitian ini, juga dikumpulkan data sekunder yang merujuk kepada sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2019). Sumber data sekunder berupa informasi mengenai investasi daerah Kabupaten Sorong yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan analisis teoritis, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat menjadi landasan untuk kebijakan publik dan strategi pengembangan sektor industri di masa mendatang (Wahyudi et al. 2024).

Pengujian Kredibilitas Data

Pengujian kredibilitas data pada kajian ini menggunakan metode triangulasi teknik pengumpulan data dengan cara mengecek data-data yang diperoleh melalui penerapan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu teknik wawancara mendalam lalu dicek dengan teknik observasi langsung dan juga dicek dengan teknik dokumentasi. Menurut Sa'adah et al. (2022) triangulasi lebih menjadi fokus bahasan. Hal itu terkait dengan penggunaan triangulasi sebagai Teknik pemeriksaan data yang paling banyak digunakan.

Analisis Data Penelitian Studi Kasus

Analisis data Model Miles dan Huberman (2018) digunakan untuk mengelompokkan data hasil wawancara mendalam dan observasi langsung secara bertahap sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Analisis data penelitian dalam rangka penelitian tentang Kebijakan Investasi Daerah di Kabupaten Sorong menggunakan penelitian studi kasus. Menurut Miles dan Huberman (2018), teknik analisis data dalam kajian ini memuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk menghilangkan atau membuang data yang tidak diperlukan. Pada tahap reduksi data ini dilakukan dengan cara: merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan hal-hal yang penting.

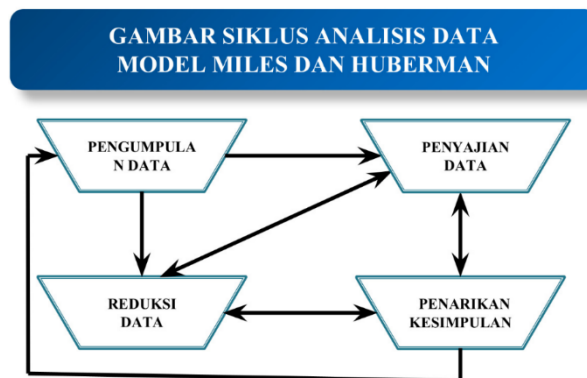
2. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu menyusun dan mengorganisir data sehingga lebih mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat dalam bentuk: uraian singkat, bagan, tabel dan grafik. Dari penyajian data uraian singkat, bagan, tabel dan grafik bukan diisi angka melainkan diisi kata-kata atau fase verbal.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dilakukan reduksi data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan diuraikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami.

Berikut ini ditampilkan gambar siklus analisis data Model Miles dan Huberman:



Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 1. Siklus Analisis Data Menurut Miles Dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan Pembangunan Berkelanjutan melalui kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut haruslah strategis dalam mendukung aspek sosial, budaya dan ekonomi serta sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan investasi sangat penting karena investasi merupakan penanaman modal atau dana yang dilakukan oleh Perusahaan dalam bentuk aset (Prikafais dan Sinardi, 2022).

Agar kebijakan investasi daerah bisa tepat sasaran maka mutlak bagi Pemerintah Kabupaten Sorong untuk menetapkan sasaran yang relevan dan realistis. Adapun sasaran investasi daerah di Kabupaten Sorong sebaiknya yaitu:

- a) Meningkatkan investasi untuk memajukan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ditentukan berdasarkan komoditas unggulan, baik yang sudah dikembangkan maupun yang memiliki potensi, dengan strategi penempatan investasi yang mengikuti sumber bahan baku.
- b) Terdapat insentif atau iklim investasi yang mendukung melalui revitalisasi lembaga ekonomi, dengan tujuan mengurangi hambatan investasi. Revitalisasi ini melibatkan perbaikan regulasi antar sektor dan antara pusat dan daerah, peningkatan kapasitas lembaga terkait termasuk penyederhanaan prosedur perijinan, perbaikan sistem perpajakan dan retribusi, serta penegakan hukum untuk keamanan dan ketertiban berusaha. Insentif lainnya termasuk pengembangan sistem infrastruktur yang terintegrasi di kawasan pengembangan dan pusat pertumbuhan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam koleksi dan distribusi wilayah Kabupaten Sorong, untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang dinamis dan kondusif.
- c) Kehadiran kepastian hukum melalui koordinasi peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Selain itu, adopsi sistem dan prosedur investasi yang transparan akan meningkatkan minat untuk berinvestasi.
- d) Investasi yang meningkat secara bertahap, terutama di kawasan-kawasan prioritas, berkontribusi pada peningkatan peran mereka terhadap PDRB dengan distribusi yang lebih merata; dan
- e) Surplus perdagangan Kabupaten Sorong mengalami peningkatan, baik dalam perdagangan antar wilayah maupun ekspor.

Agar sasaran investasi daerah di Kabupaten Sorong sebagaimana diuraikan di atas dapat dicapai, maka kebijakan strategi investasi daerah di Kabupaten Sorong yang sebaiknya diterapkan yaitu seperti berikut:

a) Kebijakan Strategi Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kebijakan strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kapasitas kelembagaan mencakup tiga aspek utama:

- 1) Mengurangi biaya transaksi dan praktik biaya tinggi melalui penyederhanaan perijinan dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
- 2) Memperbaiki kebijakan investasi yang bersifat nondiskriminatif; dan
- 3) Merumuskan sistem insentif dalam kebijakan investasi sehingga Kabupaten Sorong menjadi menarik sebagai tujuan investasi.

Kebijakan strategi mengurangi biaya transaksi dan praktik biaya tinggi melalui penyederhanaan perijinan sesungguhnya merupakan bentuk strategi pengawasan secara melekat terhadap perijinan badan usaha di Kabupaten Sorong. Diharapkan melalui penyederhanaan tersebut, proses perijinan menjadi mudah sehingga mendorong investor untuk tertarik berinvestasi di Kabupaten Sorong. Menurut Triana et al. (2024) menjelaskan dengan memberikan jaminan kepastian hukum, pemerintah dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, menarik lebih banyak investor dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b) Kebijakan Strategi Mewujudkan Kepastian Hukum, Sistem dan Prosedur Investasi

Kebijakan strategi untuk mewujudkan kepastian hukum, sistem dan prosedur investasi meliputi 4 (empat) aspek pokok yaitu:

- 1) Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan (*property right*) terutama berkenaan dengan penugasan lahan;
- 2) Memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah terutama dalam pengembangan dan operasionalisasi investasi;
- 3) Membentuk dan memberdayakan Lembaga fasilitas dan promosi investasi; dan

4) Menyusun sistem dan prosedur investasi yang jelas.

Kebijakan strategi dan prosedur investasi yang jelas secara substansial sesungguhnya merupakan kebijakan pengawasan terhadap perijinan badan usaha. Melalui sistem dan prosedur investasi yang jelas, investor memiliki pemahaman yang baik mengenai alur proses pengajuan perijinan badan usaha di Kabupaten Sorong sehingga mendorong investor tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Sorong. Menurut Marbun (2021) menjelaskan bahwa penegakkan hukum di bidang investasi juga akan mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang investasi. Selain daripada itu menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan mencegah hengkanya investasi ke berbagai negara lain.

c) Kebijakan Strategi Pembangunan Kawasan Investasi Prioritas

Kebijakan strategi pembangunan kawasan investasi prioritas didasarkan pada faktor-faktor geografis, aksesibilitas, pengikat, serta komoditas unggulan sejenis dan komplementer. Pemilihan kawasan investasi prioritas tidak hanya berdasarkan keunggulan komparatif dan faktor-faktor pendukungnya, tetapi juga mempertimbangkan keunggulan kompetitif.

Keunggulan kompetitif adalah elemen krusial dalam manajemen strategis di mana suatu kawasan memiliki karakteristik yang unik dan tidak dimiliki oleh kawasan lain. Keunggulan kompetitif tidak bersifat tetap, sehingga harus selalu memperhatikan lingkungan persaingan untuk tetap proaktif dan antisipatif.

Berdasarkan penelitian ini bisa diketahui bahwa:

1. Pemerintah Kabupaten Sorong dalam bidang investasi daerah menghadapi sejumlah persoalan seperti:
 - a) Kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - b) Potensi komoditi di setiap kawasan pengembangan belum diketahui kelayakan ekonomi maupun finansialnya.
 - c) Rendahnya kepastian hukum.
 - d) Lemahnya insentif investasi.
 - e) Kualitas Investor Skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi.
 - f) Terbatasnya infrastruktur.
 - g) Kesenjangan antar pelaku ekonomi.
 - h) Tingkat kemahalan.
 - i) Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi.
2. Untuk menyelesaikan sejumlah persoalan sebagaimana diuraikan di muka maka Pemerintah Kabupaten Sorong mutlak membuat kebijakan strategi investasi yang tepat sasaran. Karenanya sebelum kebijakan strategi ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sorong harus menetapkan sasaran investasi daerah yang tepat pula. Melalui penelitian ini diketahui bahwa sasaran investasi daerah yang sebaiknya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong yaitu:
 - a) Mengintensifkan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan;
 - b) Adanya insentif atau iklim investasi yang kondusif;
 - c) Adanya kepastian hukum;
 - d) Meningkatkan investasi secara bertahap terutama di kawasan-kawasan prioritas; dan
 - e) Meningkatkan surplus perdagangan Kabupaten Sorong.
3. Setelah sasaran sebagaimana dinyatakan di atas ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sorong mengimplementasikan kebijakan strategi investasi daerah seperti berikut:
 - a) Kebijakan Strategi Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Sorong dengan Provinsi Papua Barat Daya dan Penyediaan Sarana Energi, Listrik, Air dan Pos Telekomunikasi;

- b) Kebijakan Strategi Mengurangi biaya transaksi dan praktik biaya tinggi, Memperbaiki kebijakan investasi yang bersifat nondiskriminatif dan Merumuskan sistem insentif;
- c) Kebijakan Strategi Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah terutama dalam pengembangan dan operasionalisasi investasi usaha, membentuk dan memberdayakan lembaga fasilitasi dan promosi investasi, dan menyusun sistem dan prosedur investasi yang jelas;
- d) Mengembangkan pola kemitraan antara UMKM serta koperasi dengan Usaha Skala Besar, Kebijakan permodalan, Kebijakan pengembangan manajerial, Kebijakan pengembangan kewirausahaan, Kebijakan pengembangan wadah kelompok usaha; dan
- e) Kebijakan strategi pembangunan kawasan investasi prioritas

Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi yaitu rendahnya investasi daerah di Kabupaten Sorong. Tahapan-tahapan tersebut yaitu seperti berikut:

- a) Pemerintah Kabupaten Sorong harus mengetahui dengan jelas persoalan investasi daerah di Kabupaten Sorong;
- b) Melalui pemahaman yang baik atas persoalan investasi daerah di Kabupaten Sorong, maka Pemerintah Kabupaten Sorong harus menetapkan sasaran yang tepat terkait investasi daerah di Kabupaten Sorong sehingga persoalan investasi daerah dimaksud bisa diselesaikan; dan
- c) Setelah menetapkan sasaran investasi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sorong harus membuat dan mengimplementasikan Kebijakan Strategi Investasi Daerah di Kabupaten Sorong dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong sebaiknya menerapkan kebijakan strategi sinkronisasi rencana tata ruang Kabupaten Sorong dengan Provinsi Papua Barat Daya dan Penyediaan Sarana Energi, Listrik, Air dan Pos Telekomunikasi. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sorong juga sebaiknya menerapkan kebijakan strategi mengurangi biaya transaksi dan praktik biaya tinggi, memperbaiki kebijakan investasi yang bersifat nondiskriminatif dan merumuskan sistem insentif. Selain kebijakan tersebut, ada juga kebijakan mengenai strategi dalam menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah terutama dalam pengembangan dan operasionalisasi investasi usaha, membentuk dan memberdayakan lembaga fasilitasi dan promosi investasi, dan menyusun sistem dan prosedur investasi yang jelas. Selanjutnya dalam kebijakan strategi investasi pada Pemerintah Kabupaten Sorong sebaiknya mengembangkan pola kemitraan antara UMKM serta koperasi dengan Usaha Skala Besar, juga kebijakan permodalan, kebijakan pengembangan manajerial, kebijakan pengembangan kewirausahaan, kebijakan pengembangan wadah kelompok usaha. Dengan demikian, dilihat dari beberapa kebijakan strategi investasi tersebut, penerapan yang cocok pada Pemerintah Kabupaten Sorong yaitu dengan menerapkan kebijakan strategi pembangunan kawasan investasi prioritas dimana Pemerintah dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor, terutama sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, pariwisata dan industri kreatif.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pada izin untuk investasi di Kabupaten Sorong masih belum mampu mencapai realisasi investasi di Kabupaten Sorong, hal ini terjadi karena investor kesulitan untuk mendapatkan izin dari pemerintah terkait. Selanjutnya, agenda penelitian mendatang dapat menerapkan strategi promosi investasi daerah yang dimana merupakan hal yang penting dalam rangka peningkatan investasi daerah. Selain itu juga melakukan monitoring terhadap implementasi dan respon investor terhadap kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan daya tarik investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Diah. (2022). Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 9 No. 1 e-ISSN 2614-2945
- Harma, U. (2021). *Pengantar Manajemen Publik*. Khalifah Mediatama.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
- Marbun, Eldbert Christanto Anaya. (2021). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). *Jurnal DHARMASISYA* Vol. 1 No. 4 Hal. 1749-1760 e-ISSN: 2808-9456
- Maulani, A. Magfirah., Ansyari, Muh. Isa & Sudarmi. (2020). Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone. *Jurnal Unismuh*. Vol. 1 No. 2
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Peraturan Bupati Sorong Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).
- Polii, C. D., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mempromosikan Potensi Investasi di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance* Vol. 1 No. 1 2021. ISSN: 2088-2815
- Prikasfais, Elfayasa & Sinardi, Gideon Verrel. (2022). Studi Literatur Terhadap Kebijakan Investasi Berbasis Lingkungan Hidup pada Pembangunan Kota Surabaya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 5 No. 5. P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN: 2622-2205
- Pragmadeanti, Hindi Zahra & Rahmawati, Farida. (2022). Analisis Sektor Unggulan Dan Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Di Kawasan Strategis Malang Raya. *Jurkami: Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol. 7 No. 1 e-ISSN 2541-0938 p-ISSN 2657-1528
- Sa'adah, Muftahatus., Rahmayati, Gismina., & Prasetyo, Yoga Catur. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Al'Adad: Jurnal Tadris Matematika* Vol. 1 No. 2 pp. 54-64
- Saputra, Erwin Aditya. (2023). Strategi Peningkatan Investasi Melalui Analisis Sektor Unggulan. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* Vol. 19 No. 2 Hal. 155-168
- Sihombing, Royandi Gunawan & Pabendon, Tharsisius. (2020). Strategi Pengembangan Wilayah-Wilayah Menjadi Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Sektor Basis Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)* Vo. 14 No. 1 P-ISSN 2579-7875 E-ISSN 2622-0512
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.
- Triana, Anis Retno., Putri, Annisa Amelia., Mar'atussholikhah, Kamala., Sukma, Verga Syaharani & Hidayat, Muhammad Fajar. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol. 1 No. 3 e-ISSN: 3046-5656; p-ISSN: 3046-6172 Hal. 246-262
- Uar, Aty & Madubun, Hadija. (2021). Strategi Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. *Hipotesa* Vol. 15 No. 1 ISSN: 0852-8977

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Vindiana, Afina Putri., Puspita, Mutiara Eka & Widayani, Katri. (2022). Strategi Promosi Untuk Meningkatkan Investasi di Kabupaten Lebak. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif* Vol. 8 No. 1 2022. P-ISSN: 2528-0597 E-ISSN: 2580-5428.
- Wahyudi, Agus., Anwar, Gresceilla Septiarini., Kamila, Octavia Nuril & Silviana, Danisa Rada. (2024). Strategi Pengembangan Sektor Industri Kreatif Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* Vol. 4 No. 3 E-ISSN 2962-4797 P-ISSN 2962-3596 Hal 274-288